

Pendidikan Karakter Islam Modern di Sekolah Berbasis Pesantren¹

Oleh: M. Taufiq Rahman²

Abstrak

Kajian ini menunjukkan bahwa pesantren merupakan agen pembangunan SDM modern. Melalui pertimbangan seksama dari kandungan doktrin dalam kurikulum pesantren dan kehidupan praktis sehari-hari di pesantren, kajian ini menyimpulkan bahwa pesantren merupakan jenis institusi yang menanamkan karakter yang handal untuk generasi muda. Kajian ini secara spesifik mengungkap keunggulan-keunggulan sekolah berbasis pesantren dalam mencetak karakter Islam yang modern. Untuk ini, dibuktikan pula bahwa pesantren adalah sekolah berbasis masyarakat (pedesaan). Karena pesantren itu merefleksikan keperluan masyarakat –yaitu pencapaian kemajuan. Pesantren juga dibuat oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Di situlah mengapa masyarakat Muslim di Indonesia masih memerlukan keberadaan pesantren sehingga hari ini.

Abstract

This study shows that pesantrens (Islamic boarding schools) are agents for modern human resources. Through careful consideration on doctrinal contents in the pesantrens' curricula and their practical daily life it concludes that pesantrens are kinds of institution rightly cultivating characters and practices of valuable character building for the young generation. Specifically, this study discovers the excellence of pesantren based schools in building modern Islamic characters. To this, it is proven that pesantrens are (rural) community based schools. For they reflect the necessity of the community –the pursuit of progress. They are also made by the community and for the community itself. It is the reason why Muslim society in Indonesia still needs pesantrens up till the present day.

Keywords: *Modernization, pesantren, Islamic education, Islamic character.*

A. Pendahuluan

Pesantren dan masyarakat sekitarnya mempunyai pertautan yang erat satu sama lain yang tidak dapat diabaikan. Pertautan ini menimbulkan pengaruh satu sama lain berdasarkan situasi serta hal-hal yang dihadapinya. Dalam konteks ini, maka pesantren dapat berfungsi sebagai institusi dengan memfokuskan pada penyebaran penerapan aliran kemodernan (Hadimulyo dalam Rahardjo, 1985).

Ditinjau dari kedudukannya sebagai institusi yang mempunyai berbagai jenis dan peranan, pesantren berpotensi besar dan memberi sumbangan yang tidak diragukan lagi untuk mencapai pembangunan bangsa dan juga mewujudkan masyarakat adil makmur, baik secara material maupun spiritual.

Pada tahun 1965, Seminar Pondok Pesantren di Yogyakarta, telah bersepakat menerapkan pendidikan dan pendidikan keahlian di dalam kurikulum pesantren, seperti pertukangan, pertanian, peternakan dan bidang keterampilan lainnya (Kemenag, 1990).

¹ Didiskusikan di Madrasah Malem Reboan, Forum Diskusi Dosen UIN SGD Bandung, Bandung, 23 Februari 2016.

² Dosen Filsafat Sosial FISIP UIN SGD Bandung.

Pada masa Orde Baru, pembimbingan pondok pesantren telah dilakukan oleh pemerintah melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Sejak Pelita I dana pembimbingan pesantren diperoleh dari berbagai institusi pemerintah yang terkait, dari tingkat Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah (Noer, 1978).

Pada tahun 1975 muncul gagasan baru dalam usaha pengembangan pesantren, yaitu mendirikan pondok pesantren model baru, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, dengan nama Pondok Karya Pembangunan (PKP), Pondok Modern, Islamic Centre, atau Pondok Pesantren Pembangunan. Namun, belakangan pondok pesantren telah mengalami kekurangan tenaga pengajar yang berkharisma yang dapat memberikan bimbingan dan didikan kepada santri-santrinya (Kemenag, 1990).

Sosiolog Jerman Manfred Ziemek (1986) dalam bukunya, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, mengungkapkan bahwa pesantren bukan saja mampu mempertahankan eksistensinya di alam modern, tetapi justru secara antusias dan konsisten menyambut esensi pembangunan sekaligus mewujudkan etos dan misinya. Malah muncul teori perubahan sosial dengan model pembangunan yang emansipatif partisipatif dari pesantren untuk masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini, pesantren dan masyarakat sekitar tidak menolak arus dan tantangan perubahan sosial, tetapi membuat penyesuaian dan menerima suatu perubahan yang baik untuk kemajuan hidup (Abdullah, 1986). Ini sesuai dengan cara hidup Islam, yaitu konsep *hijrah*, yang mengutamakan pembangunan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan dan kesusahan, seperti yang tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 97.

Peneliti Jepang, Hiroko Horikoshi (1987), tertarik untuk meneliti profil kyai dalam kaitannya dengan proses perubahan sosial. Melalui kajiannya itu, Horikoshi menemukan adanya kemampuan individu seorang *kyai* dalam melakukan perubahan sosial pada saat-saat yang dipandanginya paling sukar bagi kehidupan masyarakat.

Begitu banyak penulis, terutama lulusan dari pesantren itu sendiri, yang menghubungkan pesantren dengan pembangunan sejalan dengan tekad pemerintah dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya pada masa Orde Baru (kepemimpinan Presiden Soeharto). Penulisan tersebut berusaha menunjukkan eksistensi pesantren di tengah-tengah pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Kesemua ini menunjukkan bahwa pesantren mempunyai otonomi tetapi mereka juga menyokong usaha pemerintah membangun masyarakat.

Dalam masa Orde Baru itu, "dualisme" pembangunan di Indonesia seperti yang disebut Boeke (1953), yaitu dua jenis pembangunan (modern dan tradisional) yang tidak mempengaruhi antara keduanya, dengan memodernkan desa tanpa perlu merusakkan nilai-nilai yang ada pada desa tersebut. Pesantren memang berada di tengah-tengah percaturan pembangunan tersebut. Dalam hal ini, teori dualisme bisa diaplikasikan kepada falsafah pemikiran dan operasional pesantren, yaitu tradisional dan progresif bisa digabungkan pada saat yang sama.

Akan tetapi pembangunan desa mengalami kebuntuan, sejalan dengan krisis ekonomi, sosial, dan politik Indonesia secara keseluruhan sejak akhir tahun 1990-an hingga saat ini. Dalam masalah pertanian, misalnya, didapati sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional telah menurun, sementara jumlah tenaga kerja di bidang pertanian, terutama di pedesaan, hampir tidak menurun. Hal itu disebabkan karena lahan pertanian yang semakin sempit, sistem penyewaan (*tenancy rates*) yang belum adil, dan teknologi pertanian yang belum modern. Kemunduran drastis di bidang pertanian ini telah membuat Indonesia sebagai negara ASEAN yang menjadi pengimport makanan terbesar saat ini (Widodo dalam *Masyarakat Indonesia*, 2005). Selain itu, kenaikan harga beras yang cukup tinggi, hingga pemerintah menganggapnya sampai di titik maksimum, diramalkan akan menimbulkan lagi lonjakan jumlah orang miskin. Misalnya, kajian Bank Dunia menemukan korelasi antara

lonjakan harga beras dengan lonjakan jumlah orang miskin (Pambudy dalam *Gatra*, 3 Januari 2007).

Berbagai kebijakan dan rencana pemerintah bukannya tidak ada. Kebijakan revitalisasi pertanian sudah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Juni 2005, tetapi dipandang bahwa kebijakan ini “terkesan hanya sebagai *rhetoric*, belum terlihat implementasi dan realisasinya.” Demikianlah, sehingga akibatnya tujuan pembangunan nasional sekarang dapat dianggap sebagai “semakin jauh dari pertanian dan pedesaan.” (Pambudy dalam *Gatra*, 3 Januari 2007).

Memang secara umum, agenda politik Indonesia, yang sejak era Reformasi (pasca kejatuhan Soeharto) bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, “rupanya justru makin jauh dan terpisah dengan keadaan objektif yang sungguh-sungguh diperlukan rakyat untuk perubahan.” (Abdurrahman dalam *Gatra*, 6 Desember 2006). Demikianlah, Indonesia telah memperlihatkan kepada dunia bahwa demokrasi tidak ada hubungannya dengan perubahan dan perbaikan nasib rakyat. Datanya menurut catatan Bank Dunia, sekitar 109 juta orang (49% dari penduduk Indonesia) hidup dalam kemiskinan (Praginanto dalam *Gatra*, 24 Januari 2007).

Sejalan perkembangan di atas, pesantren yang merupakan institusi pendidikan Islam tertua hingga saat ini masih terus bertahan dengan segala ciri dan perubahannya. Pesantren bahkan seringkali menjadi sentral perhatian ketika muncul masalah kemasyarakatan yang memerlukan upaya penyelesaian (Sukanto, 1999). Terutama ketika corak institusi sosial masih sangat terbatas dan sederhana –yaitu di pedesaan berbasis Islam di Indonesia—hampir semua persoalan yang dihadapi masyarakat muslim, baik menyangkut aspek ritual keagamaan maupun aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan aspek lainnya, mesti dihadapi oleh pihak pesantren dengan *kyai* sebagai figur utamanya.

Posisi yang sentral seperti itu memungkinkan pesantren untuk dapat memainkan berbagai peranan kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi masyarakatnya. Dengan kekuatan karismatik yang dimiliki seorang *kyai*, pesantren dapat menggerakkan hampir semua potensi sumber daya manusia yang dimilikinya untuk melakukan berbagai usaha dan kegiatan. Oleh karena itu, pesantren sering pula diandaikan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), ataupun pusat pembaruan masyarakat (Malik, 2005). Melalui kekuatan tersebut, pesantren dapat melakukan perubahan baik untuk komunitasnya sendiri maupun untuk masyarakatnya sekitarnya.

B. Pendidikan Kemodernan

Pendidikan Barat dikenal dengan sekolah, dan ia bersifat modern: mempunyai kurikulum yang terukur; ruang kelas yang mempunyai meja, kursi, dan papan tulis; berorientasi pragmatis, yaitu pembentukan manusia yang diperlukan untuk manajemen modern.

Namun kemodernan tidak hanya dibawa oleh Penjajah Belanda. Kemodernan adalah gejala dunia yang terus maju. Keadaan tersebut adalah suatu gejala universal. Kemunculan dunia modern tersebut ditandai dengan adanya struktur baru yang melaksanakan fungsi baru atau untuk mengambil fungsi yang dahulu dilakukan oleh struktur yang lain. Implikasinya, misalnya, muncul pekerjaan baru, institusi-institusi pendidikan baru yang lebih kompleks dan jenis masyarakat baru (Weiner [ed.], 1966).

Kemodernan, pada sudut yang lain ditandai dengan pandangan psikologis, yaitu sikap manusia yang berorientasikan prestasi. Hal ini dianggap virus mental *n-Ach* (*need for achievement*) (McClelland dalam Weiner [ed.], 1966). Menurut pandangan psikologis, didapati manusia modern tersebut mempunyai kesediaan untuk menerima ide baru dan mencoba cara-cara baru; kesediaan untuk mengekspresikan pendapat; lebih memikirkan masa sekarang dan masa depan; merasakan perlunya ketepatan waktu; lebih

memikirkan perencanaan, organisasi, dan efisiensi; kecenderungan untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang boleh dihitung; kepercayaan kepada ilmu dan teknologi; dan kepercayaan kepada keadilan masyarakat (Inkeles dalam Weiner [ed.], 1966).

Gejala universal tentang kemodernan ini melahirkan ide tentang pembangunan, yaitu cara kemajuan itu menjadikan manusia lebih dihargai dan lebih sejahtera. Pemikiran tentang hal ini dilaksanakan oleh dunia global, baik oleh kaum profesional, organisasi internasional, ataupun, yang terutama, adalah pemerintah suatu negara.

Seiring dengan kecenderungan global tentang pembangunan, pihak pemerintah Indonesia telah menetapkan empat teras pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan akses kepada pendidikan. Pemerintah mesti dapat menyediakan layanan pendidikan secara merata untuk semua warga negara.
2. Meningkatkan pemerataan dalam pendidikan. Teras ini menitikberatkan kepada prinsip pemenuhan hak dan keadilan untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara tanpa kecuali, khususnya untuk daerah-daerah perbatasan dan terpencil.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan. Teras peningkatan kualitas pendidikan merupakan kelanjutan yang tak terpisahkan dengan pilar pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. Setelah keberhasilan program penuntasan wajib belajar 9 tahun sebagai wujud keberhasilan teras peningkatan akses pendidikan, teras peningkatan mutu pendidikan kini harus dijadikan perhatian utama.
4. Meningkatkan tahap kecakapan serta efisiensi manajemen pendidikan. Jaminan mutu pendidikan harus lebih banyak dilakukan dengan berbagai studi dan evaluasi tentang faktor-faktor apa saja yang besar pengaruhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Secara nyatanya, pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan. Di antaranya adalah mendirikan sekolah dan madrasah negeri. Di Indonesia, *sekolah* adalah jenis pendidikan yang sudah diperkenalkan oleh Belanda. Sementara *madrasah* pula adalah pendidikan khusus Islam yang sudah diterima oleh organisasi Islam di Indonesia. Namun pada masa kini Pemerintah Indonesia telah mendirikan madrasah negeri, yakni masyarakat diberi subsidi untuk pembinaan madrasah ini.

Namun demikian, pihak pemerintah tidaklah terlalu mengkondisikan pesantren-pesantren tersebut untuk menjadi pesantren-pesantren kombinasi. Pihak pemerintah telah membuat banyak program untuk pesantren Salafi khususnya. Yaitu dengan program-program Wajar Dikdas Salafiyah, Program Muadalah, Program Paket A, B, dan C, bahkan pemberian beasiswa untuk murid berprestasi (Kemenag, 2009).

Secara nasional, memang pesantren telah diapresiasi oleh pihak pemerintah sebagai institusi yang secara massif memberantas buta huruf, bahkan secara umum mengamalkan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. Dengan Program Wajar Dikdas ini santri peserta program dapat belajar mata pelajaran umum wajib yang biasanya diujikan secara nasional. Mereka yang lulus program ini bias meneruskan program pendidikan di atasnya baik keagamaan ataupun lainnya, seperti menjadi pelajar pada jurusan-jurusan pertanian, kedokteran, teknik, dan sebagainya, karena mendapat ijazah yang diperlukan. Dari tahun ke tahun jumlah pesantren dan santri yang mengikuti program ini semakin bertambah dari hanya 16 pesantren dan 500 santri pada tahun 2001 menjadi 5,211 pesantren dan 397,366 santri pada tahun 2008 (Kemenag, 2004 dan 2009).

Untuk lebih jelas, berikut dinyatakan peranan pesantren dalam pembangunan masyarakat secara umum dan pembangunan masyarakat pedesaan khususnya:

- a) Sebagai institusi pendidikan yang bercorak Islam di pedesaan, pesantren menjadi pusat pembinaan mental spiritual keislaman. Kebanyakan dari pesantren tersebut menjadi pusat orientasi (anutan) orang ramai. Sebelum komunikasi berkembang pesat seperti sekarang, institusi ini menjadi pusat kebudayaan oleh masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, pesantren bukan saja merupakan pusat pendidikan tetapi tempat pembinaan kesadaran sosial, ekonomi, dan lain-lain bagiarganya dan juga masyarakat setempat.
- b) Meskipun keadaan pesantren itu berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai potensi dan kemampuan untuk mengatasi masalah masing-masing. Walaupun menghadapi beberapa masalah, mereka dapat mengembangkan potensi masing-masing melalui peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan keterampilan sekiranya bantuan diberikan. Dalam hal ini peranan kyai sangat strategis dan menentukan pengembangan pesantren itu sendiri.
- c) Peranan kyai dan pembantunya bukan saja menjadi perhatian pemimpin formal di kawasan pedesaan bahkan pemimpin formal pada peringkat nasional. Banyak fakta dan data yang menunjukkan pembangunan masyarakat pedesaan lebih dahulu dipelopori oleh mereka yang didukung oleh para kyai atau terus kyai sendiri yang kemudian didukung oleh pihak pemerintah.
- d) Nilai keagamaan yang dilaksanakan oleh pesantren memiliki potensi besar untuk mengubah sumber daya manusia dan masyarakat sekitarnya dari masyarakat yang pasif kepada masyarakat yang proaktif. Sejalan dengan pemupukan nilai-nilai spiritual dan kekuatan etos keagamaan yang dimiliki pesantren, kondisi ini bisa memberikan sumbangan yang positif dalam mengisi dan memperkuat nilai-nilai spiritual dan etika dalam kehidupan modern, sekaligus menjauhkan masyarakat dari agama. Akibatnya, tindakan menghalalkan segala cara dan tidak berlandaskan moral sering mewarnai kehidupan masyarakat modern dewasa ini.
- e) Tradisi keilmuan yang dimiliki pesantren mempunyai peranan penting dalam usaha memajukan masyarakat. Mereka yang berilmu menjadi pembimbing masyarakat ke arah cita-cita yang menjadi tujuan bersama, yaitu kesejahteraan hidup. Kemampuan untuk bersaing demi meningkatkan kesejahteraan hidup datang dari sumber daya manusia yang berkualitas, yakni yang berilmu dan mampu mengembangkan serta mengamalkan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari tradisi usaha pesantren yang menanamkan etos keilmuan kepada para santrinya.
- f) Semangat solidaritas sosial dan hidup bersama yang dimiliki pesantren menjadi landasan moral untuk membangun masyarakat, lebih-lebih lagi pesantren berada dalam lingkungan masyarakat yang relatif rendah taraf hidupnya. Hal ini menjadikan kedudukan pesantren sebagai wahana untuk mengatasi kemunduran masyarakat. Usaha peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pesantren bukanlah tugas mutlak pesantren. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dengan pesantren untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren, mesti diwujudkan. Hal ini berkaitan erat dengan strategisnya kedudukan pesantren dalam kalangan masyarakat. Pengembangan pola perkawanan yang efektif antara usaha dan pesantren seperti pendirian koperasi di setiap pesantren, amat menguntungkan kedua belah pihak.
- g) Sumber daya manusia yang bermutu menjadi penentu kemajuan pesantren di masa depan. Oleh yang demikian, peningkatan mutu pendidikan di pesantren merupakan salah satu cara utama pengembangan sumber daya manusia Indonesia, yang beriman dan bertakwa terhadap Allah SWT. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi mutu pendidikan di pesantren, semakin tinggi mutu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Allah. Pada hakikatnya, keadaan ini dapat amat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- h) Sikap mandiri pesantren, selain ukuran dari kemampuan, yaitu mampu dalam upaya meningkatkan diri baik secara pribadi, maupun secara komunitas, juga berkaitan dengan sikap mentalitas untuk maju. Sikap ini secara sadar atau tidak, dimulai dari pengajaran pesantren yang menggunakan metode *sorogan* (belajar secara individu semasa mendalami ilmu keagamaan tertentu). Sikap mandiri ini didapati sangat positif dan menjadi faktor dalam membentuk nilai kemajuan hidup.
- i) Kemauan dan keterbukaan dari kalangan pemimpin pesantren (kyai) dan pengurus pesantren diperlukan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam setiap pesantren, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih berperan dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Pesantren yang dikenal sebagai sebuah institusi pendidikan agama yang mampu berdiri sendiri, pada dasarnya bersifat “tradisional” dan merupakan institusi yang terletak di pedesaan (Prasodjo, et.al., 1982). Sementara itu, modernisasi memang merupakan suatu gelombang dunia yang kemudian diadopsi oleh negara-negara berkembang. Maka, jadilah program-program pembangunan pun bergulir di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, mengkaji pesantren pada mulanya adalah dengan pendekatan modernisasi (*modernization approach*).

Dengan pendekatan modernisasi tersebut, nyatalah bahwa pesantren diuji apakah ia mengadopsi modernisasi, menolaknya, ataupun mencampurkannya dengan tradisi yang sudah ada. Inilah yang pertama diselidiki dalam kajian ini. Tentu saja tidak bisa sepenuhnya digunakan teori-teori modernisasi yang bersifat penerapan dasar-dasar politik ataupun ekonomi yang makro seperti dari W.W. Rostow (1960) yang mempunyai teori tentang lima tahapan modernisasi ataupun teori-teori keterbelakangan (*dependency theory*) dari Cardozo, Santos, Galtung, Frank ataupun Roxborough. Apa yang mungkin adalah meneliti tentang bagaimana pesantren memodernkan dirinya. Yang dapat dilihat, kemudian, adalah perubahan sosial. Maka, teori-teori perubahan sosial seperti yang diungkapkan oleh Parsons (1963, 1971) pun diperlukan di sini.

Perubahan sosial yang terjadi di pesantren dapat dilihat dengan pendekatan sistemik dari Bertalanffy (1973) dan Albrecht (1978). Di sini yang diperlukan adalah standard-standard organisasi modern untuk melihat sejauhmanakah kemodernan diadopsi oleh pesantren. Teori-teori manajemen modern pun digunakan untuk menjelaskan hal ini, bermula dari teori manajemen modern yang dijelaskan oleh Huse (1979), Weihrich (1985), Koontz (1986) sampai teori tentang manajemen sekolah seperti yang dikenalkan oleh Poston, Stone, dan Muther (1992).

Setelah mengetahui sejauhmana pesantren memodernkan dirinya, tibalah saatnya untuk meneliti permasalahan kedua dalam kajian ini, yaitu peranan pesantren dalam pembangunan masyarakat desa pada masa kini. Demikian karena pesantren dikenali pula sebagai institusi sosial yang berpengaruh (Prasodjo, et.al., 1982). Hal ini dapat dilihat dari beberapa tesis tentang pesantren dan pembangunan masyarakat yang dapat diambil dari kajian-kajian yang lalu, yaitu:

1. Pesantren sangat berperan dalam pembinaan spiritual. Dari awal pendiriannya, pesantren sering menjadi pusat pemupukan spiritual umat Islam, terutama dalam organisasi-organisasi tarekat (Bruinessen, 1999; Praja dalam Nasution, 1990).
2. Pesantren berperan dalam pembangunan ekonomi. Ada pesantren pertanian seperti Pesantren Darul Falah di Bogor (Prasodjo et. al., 1982) atau pesantren agribisnis seperti Pesantren al-Ittifaq di Bandung (Syahid [ed.], 2003).
3. Pesantren berperan dalam pembangunan politik. Hal ini terutama terlihat ketika pesantren dijadikan sebagai benteng budaya politik tandingan (*counter culture*) bahkan sebagai pusat gerakan menentang penjajahan (Samson dalam Jackson, 1970). Pada masa Orde Baru (masa Pemerintahan Soeharto) sebagian pesantren telah dijadikan agen politik pemerintah Indonesia (Cahyono, 1992).

4. Pesantren berperan dalam pembangunan sosial. Misalnya, pesantren berperan dalam menyembuhkan penyakit masyarakat seperti masalah dadah (Abdul Kadir, 1990), diminta mengubat orang sakit dan diminta untuk melariskan barang dagangan (Geertz, 1960).
5. Pesantren berperan dalam pengembangan budaya. Pesantren memiliki tradisi yang khusus, yang disebut sebagai “*sub-culture*” pesantren (Wahid dalam Rahardjo, 1995), yaitu misalnya budaya pengajian, muzik rebana, musabaqah tilawah al-Qur’an, dan lain-lain yang kesemuanya telah mewarnai budaya masyarakat Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, budaya-budaya modern pun datang dan diserap serta disebarkan oleh pihak pesantren kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam budaya modernisasi tanah wakaf yang berdasarkan tatacara undang-undang modern, juga modernisasi kepemimpinan yang tadinya bersifat individual menjadi kolektif dan hal-hal modern lainnya yang lebih rasional dan terhitung (Sukamto, 1999).
6. Pesantren berperan dalam pembangunan teknologi. Sebagai tempat berkumpulnya orang-orang pedesaan, pesantren dapat dijadikan agen untuk penyebaran teknologi. Bermula dengan penyebaran teknologi yang agak sederhana seperti teknologi pertanian, pesantren telah pun bersedia sebagai agen pembangunan teknologi (Syahid [ed.], 2003).
7. Pesantren merupakan salah satu institusi kemasyarakatan yang memainkan peranan yang cukup besar dalam proses pembangunan masyarakat, khususnya di pedesaan. Peranan pesantren seperti itu berlangsung dengan memusatkan perhatian pada kompleksitas institusi pesantren yang memiliki struktur dan aktivitas yang cukup aktif untuk membangun masyarakat sekitarnya (Rahardjo, 1995).

Tentu saja pesantren tidak serta merta membangun desa di sekitarnya tanpa adanya rangsangan program-program pembangunan dari pihak pemerintah. Untuk hal ini pun diperlukan adanya teori-teori pertukaran dan sosiologi pembangunan yang melihat sejauhmana interaksi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat sekitar tentang pembangunan. Dari sinilah munculnya teori dualisme yang dipikirkan Boeke (1953) dan masyarakat transisi atau prismatic dari Abraham (1991) dan Riggs (1985).

Mengingat bahwa pesantren itu merupakan institusi pendidikan tertua yang masih ada di Indonesia, sudah mestilah banyak hal yang membuatnya bertahan hidup dan bahkan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tulisan ini memperhitungkan pembangunan sosial yang merupakan suatu program kesejahteraan atau bantuan bagi orang miskin melalui keperluan dasarnya, yang bukan saja mencakup peluang untuk memperoleh pendapatan, malahan juga akses terhadap perkhidmatan awam, seperti pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan, air bersih, dan lain-lain (Korten dan Alfonso, 1981). Demikianlah konsep pembangunan di sini adalah konsep “pembangunan integratif”.

C. Karakter Kemodernan Islam

Yang dimaksud dengan karakter Islam adalah nilai-nilai karakter yang diakui Islam sebagai karakter yang baik, yang dapat menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Afirmasi ini dapat kita rujuk pada *nash-nash* al-Qur’an maupun Hadits. Dengan demikian, pembahasan nilai-nilai karakter ini dilakukan dengan memakai metode *maudhui* (tematik). Yaitu, pembahasan dengan menyertakan ayat-ayat al-Qur’an atau hadits-hadits Nabi, ditambah dengan pendapat para ulama mengenainya.

Apa yang disebut karakter dalam Islam adalah akhlak. Dan akhlak yang tinggi yang harus dicontoh oleh umat Islam adalah akhlak Rasulullah. Karena padanyalah

akhlak yang agung dipraktekkan (68:4). Karakter dasar kebaikan manusia berjalan sejalan ditiupkannya Ruh Tuhan pada manusia (15:29).

Yang penting untuk penumbuhan karakter pembangunan adalah penanaman karakter Islam untuk aspek individual. Di sini, individu harus berbuat dan bersikap terhadap dirinya sendiri. Untuk menumbuhkan karakter yang membawa pada semangat *community development*, hal-hal berikut yang berdasarkan dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits merupakan hal-hal yang selalu diingat dan diajarkan di pesantren.

1. Kerja Keras

Bekerja merupakan keperluan yang niscaya bagi manusia. Karena, dengan bekerjalah manusia dapat memenuhi keperluan hidupnya, atau lebih jauhnya dapat mencapai kebahagiaan yang diinginkannya. Oleh karena itu, maka tak heranlah jika manusia disebut sebagai makhluk pekerja atau pencipta (*homo creator*).

Namun, bagi umat Islam, bekerja bukanlah sekedar memenuhi hajat hidupnya saja. Bagi mereka bekerja adalah hal yang *complicated* yang menyangkut pula masalah ketuhanan dan aspek-aspek lainnya. Di sini dijelaskan tentang aspek-aspek yang menjadi maksud dan tujuan bekerja menurut visi Islam.

Tujuan bekerja dalam Islam bukanlah sekedar memenuhi naluri alamiah sebagai makhluk hidup, yaitu hidup untuk kepentingan kelangsungan hidup (*survival*) saja. Islam memberikan pengarahannya kepada satu tujuan filsafat yang luhur, tujuan yang mulia, tujuan ideal yang sempurna yaitu untuk ber-*ta'abbud*, memperhambakan diri, mencari keridhaan Allah SWT.

Demikian itu dikarenakan Allah tidak menjadikan kita kecuali supaya kita menyembah kepada-Nya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan: "*Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*" (QS. Al-Dzariyat/51: 56).

Sebab lain adalah bahwa dengan ridha Allah-lah manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya. Firman-Nya: "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.*" (QS. Al-Bayyinah/98: 8).

Dengan tujuan mencari ridha Allah itulah maka seorang Muslim mempunyai niat yang baik, yaitu keikhlasan sebagai budaya kerja. Dengan keikhlasan itu, maka tidak ada tujuan lain yang menyertai pekerjaan itu kecuali hanya kepada Allah. Itulah keutamaan dalam bekerja. Sedangkan manfaat-manfaat lain peringkatnya berada di bawah itu.

Banyak sekali keuntungan yang boleh kita ambil daripada keikhlasan ini, terutama dalam hal profesionalisme. Sebab dengan keikhlasan, maka tidak ada suatu pun yang menghalangi seorang Muslim untuk bekerja sebaik-baiknya dalam rangka menuju ridha Allah.

Ikhtiar memenuhi keperluan hidup sehari-hari adalah perintah agama. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an: "*Carilah kebahagiaan yang disediakan untukmu oleh Allah di hari akhirat kelak, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia.*" (QS. Al-Qashash/28: 77).

Memenuhi keperluan sesuai dengan naluri tentulah harus terarah dengan tujuan mulia dan mengikuti jalan yang lurus yang diridhai oleh-Nya. Maka kita diperintahkan makan barang yang halal sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Qur'an: "*Hai manusia, makanlah barang halal dan baik daripada apa yang ada di bumi, dan*

janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang bagi kamu.” (QS. Al-Baqarah/2: 168).

Demikian pula dalam hal pakaian, Allah menyuruh untuk menghasilkan dan memakai pakaian yang baik, sekaligus pula menyuruh untuk memakai ‘pakaian’ takwa: *“Hai anak-anak Adam, sesungguhnya telah kami adakan untukmu pakaian untuk menutup aurat kamu dan sebagai perhiasan. Serta pakaian takwa itulah yang terbaik.”* (QS. Al-A’raf/7: 26).

Tujuan bekerja yang lain adalah menafkahi keluarga, dan ini merupakan tugas daripada kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dan keharmonian rumah tangganya. Rasulullah bersabda: *“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya.”* (HR. Bukhari Muslim).

Bekerja juga dimaksudkan untuk mensejahterakan isteri. Karena dalam Islam terdapat kewajiban menafkahi isteri, sebagaimana Firman Allah SWT: *“Wajiblah bagi seorang kepala rumah tangga untuk membelanjai dan memberi pakaian terhadap isterinya dengan sepatutnya.”* (QS. Al-Baqarah/2: 233).

Begitu mulianya bekerja dengan maksud untuk menafkahi keluarga, sehingga menurut Islam, menafkahi keluarga bergajaran besar. Sabda Rasulullah SAW: *“Satu dinar kamu dermakan dalam perjuangan fi sabilillah, dan satu dinar kamu pergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan satu dinar kamu sedekahkan pada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, yang terbesar ganjarannya ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu.”* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Atau sabdanya yang lain: *“Tiada kamu belanjakan apapun juga yang kamu niatkan karena Allah, melainkan mendapat ganjaran, hingga pada makanan yang engkau masukkan dalam mulut isterimu.”* (HR. Bukhari Muslim dari Saad bin Abi Waqqash).

Kemudian dalam hadis lain disebutkan: *“Apabila seseorang membelanjai keluarganya dengan mengharapkan ganjaran (dari Allah), maka tercatat baginya sebagai sedekah.”* (HR. Bukhari Muslim).

Sebaliknya, mengabaikan keluarga dan tidak bekerja untuk memberi nafkah pada keluarga adalah dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Cukuplah bagi seseorang itu dosa kalau ia mengabaikan (nafkah) orang yang menjadi tanggungannya.”* (HR. Nasa’i dari Abdullah bin Umar).

Manusia selaku makhluk bermasyarakat (*homo socius*), saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi hajat hidupnya yang menuntut bantuan tenaga, pikiran, dan dana; atau guna melakukan peribadatan bersama seperti kurban, sedekah, dan sebagainya. Di sinilah dianjurkannya kita saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”* (QS. Al-Maidah/5: 2).

Memang seluruh kerja umat Islam –bahkan seluruh hidupnya—adalah ibadah. Sayyidina Ali r.a. menyebutnya sebagai *hayaatunaa kulluhaa ‘ibadah* (hidup kita semuanya adalah ibadah). Secara umum demikianlah adanya, seperti sebelumnya telah disebutkan dengan banyak mengutip ayat Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Namun, jika ada di antara kita yang berpikiran bahwa yang disebut ibadah itu hanyalah yang *mahdhah* saja, maka kita dapat menelusuri pemikiran berikut dalam hubungannya bahwa bekerja itu ibadah sama seperti ibadah *mahdhah*. Dalam memenuhi peribadatan yang khusus (*ritual-ceremonial*) atau yang biasa disebut sebagai ibadah *mahdhah* kita mahu tak mahu dituntut untuk bekerja.

Jelasnya, ketika kita diperintah Allah untuk sembahyang, maka secara tidak langsung kita pun diperintah untuk mempersiapkan sarana dan pra-sarana untuk sembahyang, seperti penyediaan air wudhu yang suci, tempat sujud yang bersih, dan lain-lainnya. Demikian pula ibadah *mahdhah* yang lain seperti zakat, haji, kurban, dan lain-lainnya semuanya memerlukan kerja yang saling terkait.

Kegiatan kerja ini, betul-betul mulia, dan bahkan menurut ulama *usul fiqh* adalah sama wajibnya dengan peribadatan yang ditujunya. Sebab, menurut mereka: “*al-amru bi syai'in amrun biwasaailihi*” (Perintah terhadap sesuatu adalah juga perintah terhadap perantaranya).

Atau dalam kaidah ushul fiqh lainnya: “*Maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib.*” (Apa saja yang tidak akan sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu yang lain, maka yang kedua itu pun wajib adanya).

Membiarkan diri miskin dan hidup meminta-minta adalah akhlak tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Apabila seseorang itu terus-terusan meminta-minta hingga ia kelak berhadapan dengan Allah, tanpa sepotong daging pun di mukanya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain disebutkan: “*Siapa yang meminta-minta untuk memperbanyak kekayaan, maka tiada lain hanya memperbanyak bara api. Terserah kamu apakah kamu akan memperbanyak atau mengurangnya.*” (HR. Muslim).

Selain itu, dengan bekerja yang baik, maka pada saat itu pula pekerjaan yang buruk terkurangi. Karena, banyak data nyata dalam kehidupan bermasyarakat yang menyatakan bahwa kejahatan dan kemunkaran itu terjadi karena adanya pengangguran. Maka, dengan demikian, bekerja dengan baik adalah juga mengurangi bahkan menolak segala bentuk kemunkaran.

2. Berjiwa Wirausaha

Walaupun kebanyakan ayat tentang jual beli itu merupakan ayat-ayat teologis, namun di sisi lain ayat-ayat tersebut telah pula membentuk suatu hukum (*fiqh*) *mu'amalah*. Dalam perkembangannya, kitab-kitab fiqh lebih menonjolkan istilah “*buyu*” yang menunjukkan kepada berbagai macam jual-beli seperti: barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang (*sharf*), barang dengan tanggungan (*salam*/jual beli secara bertempo), *khiyar* (penentuan laba) dan penambahan (*muzayadah*) (Ibnu Rusyd, 1995:2). Kata *bay'a* sendiri berasal dari akar kata *al-baa'u* yang berarti mengulurkan tangan. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak yang terlibat di dalam jual beli tersebut saling mengulurkan tangan mereka untuk mengambil dan memberi. Adapun secara istilah, *al-bay'* adalah “saling tukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul” (Ahmad Isa Asyur, t.t.:5).

Dalam fiqh, *al-tijarah* atau *al-bay'* yang berarti jual beli ini dikenal sebagai salah satu cara yang dilegalisasi oleh Islam dalam mewujudkan kemaslahatan ummat berkaitan dengan harta. Landasan al-Qur'an yang terkenal adalah bahwa “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. 2:275), dan “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. 4:29). Walhasil, al-Qur'an menyebut *tijarah* (perdagangan) dengan sifat atau indikasi yang menunjukkan bahwa perdagangan itu merupakan suatu usaha yang diridhai Allah, yaitu dengan digunakannya istilah “*ibtigha min fadlillah*” (mencari karunia Allah), seperti tersurat dalam Firman Allah, “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.*” (QS. 62:10).

Selain al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW pun seringkali dikutip untuk menegaskan legalisasi jual beli ini. Diantara hadits-hadits itu misalnya, "*Hendaknya kalian mencari kayu bakar untuk dijual, karena perbuatan itu lebih baik daripada meminta-minta terhadap orang lain, baik diberi maupun tidak.*" (Bukhari, I, 1994:316). Dalam hadits lain disebutkan bahwa "*Perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.*" (Ahmad, II, t.t.:208). Kehalalan jual beli dan penekunannya itu sudah berlaku (dibenarkan) oleh ummat Islam (*ijma'*) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini (Sayyid Sabiq, III, 1983:127).

Keterangan-keterangan tersebut mengungkapkan bahwa usaha perdagangan bukan saja halal dan produktif, melainkan juga mulia jika berjalan di atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam tetap mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan masyarakat, baik terhadap tubuh maupun rohani mereka. Hal ini dikenal dengan ungkapan "*Laa dharara wa laa dhiraara*" (Tidaklah boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri ataupun membuat kemudharatan pada orang lain).

(2) Antara dua penyelenggara mu'amalah tetap ada keadilan, dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam setiap akad.

(3) Tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara mu'amalah itu bahkan juga dengan yang lain. Dalam hadits dinyatakan, "*Allah merahmati seorang hamba yang murah hati apabila berjualan atau membeli atau menagih utang.*" (Bukhari, I, 1994:256).

(4) Jelas dan jauh dari perselisihan. Dengan demikian, tidak boleh melakukan *gharar* (samar-samar), pemalsuan, maupun penipuan.

D. Praktik Pendidikan Karakter

1. Praktik Pendidikan Karakter di Pesantren

Selain dalil-dalil yang menjadi pedoman etis, praktik sehari-hari di pesantren pun memicu jiwa *community development* pada diri santri. Karena dengan teori dan praktik itulah maka jiwa kemajuan akan melekat pada para santri. Inilah yang disebut dengan penanaman karakter.

Penanaman karakter pada anak bukanlah hal yang baru. Setiap orang tua di segala zaman selalu menanamkan karakter pada anaknya. Demikian karena hidup tanpa karakter berarti hidup tanpa tujuan, tanpa ruh, dan tanpa semangat. Karakter sebagai modal psiko-mental, dengan demikian, harus diturunkan kepada anak sejalan dengan menurunkan kemampuan mereka untuk terus hidup. Itulah yang selalu dilakukan oleh para orang tua.

Secara umum kita bisa katakan bahwa teori-teori penanaman karakter sesuai dengan kehendak masyarakat, atau apa yang disebut sosialisasi sangatlah bertaburan. Misalnya, ada teori yang menumpukan perhatian pada beberapa hal seperti melihat perkembangan kognitif (seperti Piaget), penanaman moral dan identitas personal melalui hubungan kekeluargaan (seperti Freud), penerapan kategori moral dan nilai (seperti Durkheim), konsep diri dan identitas sosial (seperti Mead), dan perkembangan keterampilan sosial yang membuat keberhasilan interaksi, terutama dalam komunikasi linguistik (seperti Bernstein).

Memang, secara sosiologis, karena kita berkembang dan bermasyarakat, di masyarakat kita muncul pembagian tugas, yaitu adanya tenaga yang mengajarkan kemampuan dan karakter kepada generasi muda (Rahman, 2011). Mereka dikenal dengan guru, ustadz, dan sebagainya. Dan mereka tidak hanya mengajar dari rumah ke rumah, atau di rumahnya, atau di tempat ibadah. Mereka pun mempunyai lembaga pendidikan.

Maka, kepada guru-guru di lembaga-lembaga pendidikan itulah tiap-tiap keluarga menitipkan anak-anaknya untuk dididik. Di situlah karakter pun tertanam, tumbuh, dan berkembang. Demikian karena di lembaga-lembaga pendidikan itulah generasi muda kita diasuh, dididik, bahkan menghabiskan waktunya setelah di rumah mereka.

Kemudian, selain pendidikan yang berdasarkan kurikulum yang formal, lembaga pendidikan juga melatih anak-anak didiknya dengan pendidikan sampingan (kokurikulum). Yang berbeda adalah fokus kokurikulum tersebut. Misalnya, di pesantren-pesantren tradisional, keterampilan hidup yang ditawarkan kepada santri ialah keterampilan hidup di pedesaan seperti masalah pertanian (Mustari & Rahman, 2010). Sementara itu, di pesantren-pesantren modern, keterampilan hidup sudah mengarah kepada gaya profesionalisme hidup di kota seperti latihan jurnalistik, bahasa Inggris, keterampilan berdebat dan retorika, dan lain-lain. Namun begitu, semua keterampilan hidup tersebut masih bersifat kokurikulum. (Wawancara dengan Kepala SMA Plus Muallimin Persis Rajapolah, Tasikmalaya, 18 Oktober 2008).

Keterampilan hidup yang menjadi kurikulum pesantren sudah dilaksanakan di pesantren-pesantren Kombinasi yang sudah membuka sekolah-sekolah kejuruan (SMK). Di sini, santri-santri menjadi tenaga profesional menengah ketika tamat dari sekolah-sekolah kejuruan tersebut. Sekolah-sekolah tersebut menginduk pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikbud) yang mempunyai kurikulum yang dikhususkan untuk melahirkan tenaga profesional menengah. Di SMK ini keterampilan hidup sudah dijuruskan supaya pembelajaran menjadi lebih terfokus. Misalnya jurusan otomotif untuk keterampilan perbengkelan mobil; jurusan pembangunan untuk keterampilan pembangunan rumah; jurusan bisnis untuk keterampilan administrasi dan perniagaan, dsb.

Diakui oleh salah seorang pemimpin pesantren jenis kombinasi ini (yaitu Kyai Asep Rifa'i, dari Pesantren Ar-Riyadh Leuwisari, Kab. Tasikmalaya) bahwa dengan berdirinya sekolah kejuruan di pesantrennya, santri-santri semakin banyak yang datang dan bermukim di pesantren. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tujuan dunia (yaitu pandai untuk hidup *survival*) dan tujuan akhirat (yaitu memahami ilmu agama) yang dilaksanakan secara bersamaan di pesantren gabungan *salafi* dan *khalafi* tersebut. (Wawancara di Leuwisari, Kab. Tasikmalaya, 19 September 2008).

Tentang hal ini Pesantren Suryalaya mempunyai tujuan, yaitu santri harus mempunyai kualitas sebagai hamba Allah (Abdullah) dan wakil Allah di muka bumi (Khalifah) secara sekaligus, tidak separuh-separuh. (*Satu Abad Pondok Pesantren Suryalaya*, 2005).

Demikianlah, dengan kokurikulum lembaga pendidikan agama seperti pesantren pun dapat memberi semangat kepada para santrinya untuk mempunyai karakter tidak pantang menyerah, optimis, dan bekerja keras. Tidak heran jika pesantren tidak hanya mampu melahirkan ulama saja, malah bisa pula memunculkan orang yang mampu menjadi pekerja dalam berbagai bidang. Demikian karena pesantren sekarang lebih banyak mengajarkan berbagai keterampilan.

Yang paling terlihat dari lembaga pendidikan adalah kedisiplinan. Setiap lembaga pendidikan sudah pasti menerapkan disiplin kepada anak-anak didiknya. Namun, yang paling nampak kedisiplinan itu diterapkan di lembaga pendidikan pesantren. Upaya pesantren untuk membentuk kepribadian yang taat beragama ditunjang dengan strategi luar (lahir) yang berbentuk kegiatan pendidikan dan pembinaan diri selama 24 jam sehari dan strategi dalam (bathin) berbentuk ibadah ritual yang dilakukan secara bersama-sama (berjamaah) seperti latihan hati (*Riyadloh Qalby*), tadarus al-Qur'an, shalat berjamaah awal waktu, shalat tahajud dan duha, dan lain-lain.

Dengan pembinaan kepribadian muslim tersebut yang dibentuk oleh pesantren diharapkan santri menjadi insan yang mempunyai disiplin yang tinggi. Hal itu diperkukuh dengan tatatertib. Walaupun pada mulanya disiplin tersebut diawasi oleh para ustadz dan santri senior, namun pada akhirnya santri sendiri sudah dapat mengikuti pola hidup pesantren secara mekanistik dan otomatis. Setiap kegiatan dibedakan dengan bunyi bel. Hal ini dilakukan, misalnya, di pesantren al-Furqon Muhammadiyah Singaparna. Lain halnya dengan kehidupan santri di Miftahul Huda. Tidak ada lonceng sama sekali. Oleh karena itu, santri perlu sentiasa mengingat jadwal mereka. Jika tidak, santri-santri senior akan mengingatkan mereka dengan cara menyapu (*sweeping*) ke seluruh pelosok bangunan pesantren. (Wawancara dengan anggota Resimen Santri [Ressant] di Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, 19 Oktober 2008).

Disiplin memang nampak keras, tetapi dengan disiplin didapati suatu kepastian. Yaitu kepastian untuk mencapai sesuatu yang baik. Disiplin adalah usaha untuk membuat keras tubuh kita yang suka akan yang lunak-lunak. Dengan kekerasan hati, kita akan mendapat suatu yang kita inginkan. Di pesantren, disiplin adalah hal yang utama yang harus ditanamkan pada diri setiap murid (santri). Banyak keluaran pesantren yang hebat-hebat pada masa dewasanya adalah karena mereka berdisiplin dalam hidup mereka, persis seperti ketika mereka belajar di pesantren.

Memang, kunci sukses pembinaan pengembangan manusia di pesantren tertumpu pada sikap rutin, yaitu terus-menerus melakukan pembinaan diri para santri. Hal ini didasarkan pada niat dan pandangan luhur para kyai bahwa santri yang ada di bawah bimbingannya merupakan *amanah* Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Mereka juga diberi bekal, yakni ilmu pengetahuan, untuk menghadapi kehidupan ketika tamat pendidikan di pesantren. (Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Pesantren Al-Furqon, Singaparna, Tasikmalaya, 17 Oktober 2008).

Namun demikian, dalam hal penanaman disiplin ini, pihak pengelola lembaga pendidikan janganlah hanya tertumpu pada hal-hal yang bersifat fisik saja, tanpa penghayatan. Renungan-renungan dari hati sanubari perlu ditanamkan kepada anak-anak didik agar semua disiplin itu diresapi dan diinternalisasi ke dalam diri santri.

Lembaga pendidikan juga harus mendorong anak didiknya untuk bisa belajar sendiri (otodidak). Demikian karena, dengan otodidak para murid atau santri dapat mengerahkan pikiran dan kemampuannya sendiri. Belajar menjadi lebih masuk terserap ke dalam pikiran dan perasaannya. Begitu pula, dengan cara belajar seperti inilah nantinya mereka akan menghadapi dunia.

Cara belajar otodidak ini misalnya dapat menumbuhkan karakter cinta ilmu, rasa ingin tahu, dan bahkan sifat egalitarianisme. Sikap demokratis atau egalitarianisme ini, misalnya, sungguh menonjol di pesantren. Di pesantren, para santri harus belajar bersama-sama yang lain dengan dibantu kyai, para ustadz dan fasilitas yang sama. Tidak ada pemihakan emosional dalam pembelajaran di sini. Para santri diajarkan untuk berpikir sendiri. Para ustadz dan kyai hanyalah mengantarkan para santri pada sumber-sumber yang asli, yang original, dari sumber-sumber Islam. Para santri dibiasakan untuk melihat langsung potret Islam dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui al-Qur'an itu sendiri dan kitab-kitab Hadits. Dengan demikian, tidak ada otoritas merasa benar sendiri atas Islam yang dianut. Demikian karena santri maupun ustadz, memegang kitab-kitab yang sama dan pemikiran mereka berdasarkan kaidah *ittiba'*, yaitu « *qabuulu al-qauli al-qaa'il wa anta ta'lamu min aina ma'khudzuhu* » (menerima suatu perkataan dari yang berkata dan Anda tahu dari mana sumber pengambilannya).

Keterampilan keagamaan adalah salah satu di antara yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, bahkan sekolah yang bersifat umum sekalipun. Di sekolah-sekolah umum ada guru agama yang membimbing praktek beragama menurut

agama masing-masing anak didik. Namun yang sangat menekankan keterampilan keagamaan adalah pesantren.

Pesantren pada dasarnya adalah institusi pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, keterampilan yang terutama dibina di pesantren adalah keterampilan yang bersifat keagamaan. Seluk-beluk kehidupan beragama mestilah dikuasai oleh santri keseluruhannya. Begitu juga setelah keluar dari pesantren, santri sudah mampu memperlihatkan dirinya sebagai seorang alim. Di sinilah dipupuknya rasa percaya diri.

Seorang santri itu sebelum keluar dari pesantren harus sudah dapat menghafal sekurang-kurangnya Juz ‘Amma (Juz ketigapuluh) dari al-Qur’an, menghafal dalil-dalil populer dari al-Qur’an dan Hadis, menghafal doa-doa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, mengetahui tatacara khutbah, mengimami shalat, dan mengajarkan Islam. (Dari Dokumen Resmi Pesantren Miftahul Huda dan Wawancara dengan Pemimpin Pesantren al-Furqon Muhammadiyah, Singapura, Tasikmalaya, 19 September 2008).

Memang, setelah tamat mengaji di pesantren, masyarakat menuntut santri untuk menjadi pemimpin keagamaan dalam lingkungan (tempat) mereka, baik sebagai seorang khatib, imam shalat, penceramah dalam pengajian, ataupun menjadi guru agama untuk anak-anak usia sekolah. (Wawancara dengan Pemimpin Pesantren Persis Ciberekah, Rajapolah, Tasikmalaya, 16 Oktober 2008).

Di Pesantren Miftahul Huda, semua keterampilan keagamaan tersebut dipelajari dan dinilai sebelum tamat belajar. Di pesantren-pesantren modern pun begitu juga. Di sana, teori dan praktek untuk membina calon guru atau guru masyarakat sangat ditekankan. Hal ini pada akhirnya akan membina rasa percaya diri santri apabila kelak mereka terjun ke masyarakat.

2. Sambutan Pemerintah terhadap Sekolah Berbasis Pesantren

Sekolah berbasis pesantren memang sudah banyak berkembang tumbuh di masyarakat. Hal itu kebanyakannya merupakan respon pihak pesantren dan masyarakat pada umumnya atas perkembangan zaman yang menuntut diapresiasinya ilmu-ilmu kemodernan. Namun, apresiasi itu tentu berbeda-beda dari segi pelaksanaannya. Demikian karena pihak pesantren pun berbeda-beda dari segi kemampuan dan resepsinya atas pendidikan model sekolah. Dari sini muncullah respon dari pihak pemerintah.

Dalam apresiasinya terhadap pesantren yang mendirikan sekolah, pihak pemerintah telah melakukan pengkajian dan menyiapkan berbagai macam proyek untuk membantu kelancaran sekolah berbasis pesantren. Dalam apresiasinya, menurut pemerintah (Kemdikbud, 2012), Sekolah Berbasis Pesantren (SBP) adalah sekolah yang mengintegrasikan keunggulan sistem pendidikan sekolah dan pesantren. Pada tataran implementasinya, SBP menitikberatkan pada: (a) peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta kemandirian dalam hidup (b) pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan. Pilihan memadukan sistem sekolah dan Pesantren ini diambil setelah melihat dan mengamati secara seksama mutu pendidikan yang dilahirkan oleh masing-masing sistem. Secara umum, pesantren dan sekolah merupakan dua satuan pendidikan yang masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda satu sama lain. Bila mereka berjalan sendiri-sendiri, ada potensi dan kekuatan pendidikan yang pemanfaatannya kurang optimal. Namun bila kedua unggulan itu dapat disatukan, maka akan lahir sebuah kekuatan pendidikan yang komprehensif untuk melahirkan anak Indonesia yang unggul.

Kemdikbud (2012) menilai keunggulan yang dikembangkan dalam SBP adalah nilai-nilai keunggulan yang dimiliki oleh sistem pesantren dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem persekolahan. Nilai unggul yang dimiliki sistem pesantren adalah kekuatannya dalam pengembangan akhlak mulia dan pembinaan kepribadian,

sedangkan nilai unggul yang dimiliki sistem sekolah adalah kekuatannya dalam pengembangan mutu akademis.

Program SBP yang dikembangkan melalui kerja sama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama ini telah dimulai pada tahun 2008 dan saat ini diikuti oleh SMP di 111 pondok pesantren, tersebar di 86 kabupaten/kota, 26 provinsi. Pada tahun 2012 ini direncanakan akan dikembangkan lagi program SBP di 39 pondok/SMP. Sehingga seluruhnya berjumlah 150 SMP Berbasis Pesantren (Kemdikbud, 2012).

Untuk mendorong pencapaian tujuan yang diharapkan, berbagai langkah telah diambil dalam bentuk bantuan pemenuhan ketersediaan sumber daya pendidikan, seperti bantuan pembangunan RKB dan ruang belajar lainnya, alat pembelajaran, workshop pengembangan KTSP, bantuan pembinaan SBP, bantuan pengembangan SBP. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan lima misi Direktorat Pembinaan SMP, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu (5 K). Untuk lebih memperkuat kemampuan SMP Berbasis Pesantren dalam mencapai tujuan, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan SMP akan melanjutkan program bantuan komprehensif yang dapat digunakan untuk memenuhi lima misi (lima K) di atas, khususnya upaya pencapaian peningkatan kualitas dan daya saing.

Di sisi lain, kita mengamati bahwa proses pembelajaran di Indonesia, khususnya pembelajaran mata pelajaran Matematika, Ilmu pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) belum sepenuhnya efektif. Para siswa cenderung sekedar membaca dan menghafal. Proses pembelajaran menjadi kurang menyenangkan, bahkan sebagian siswa menganggap sebagai hal yang menjemukan. Selain itu, pada saat proses pembelajaran tidak ada sikap atau pola pikir ilmiah yang sampai pada siswa. Sebagai gilirannya siswa tidak dapat mengembangkan pola berfikir kreatif dan kritis (*creative and critical thinking*).

Mutu pendidikan dapat dilihat dari penguasaan para siswa terhadap hasil pembelajaran baik dilihat dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Sehubungan dengan itu peningkatan mutu bidang Matematika, IPA dan IPS dipandang perlu untuk dilakukan dan ditampilkan oleh siswa-siswi yang berprestasi sebagai suatu hasil pembelajaran di sejumlah SMP.

Peningkatan mutu pendidikan banyak dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kurikulum, sarana dan prasarana serta kompetensi guru untuk mengelola proses pembelajaran. Pengembangan kemampuan dan kompetensi siswa yang berprestasi dapat dilakukan dengan melalui pembinaan dan pelatihan yang sistematis oleh sekolah yang bermutu.

Lomba-lomba bidang akademik merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk memotivasi siswa, guru dan sekolah untuk lebih maju dalam pembelajaran khususnya dibidang Matematika, IPA dan IPS. Selain itu, lomba tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran tersebut.

Demikianlah, untuk meningkatkan kemampuan SMP Berbasis Pesantren dalam mengembangkan kompetensi siswa yang berprestasi agar mampu berkompetisi, dalam pemanfaatan bantuan pembinaan SBP juga dipergunakan untuk pembinaan kompetensi siswa; Kemdikbud telah melakukan banyak hal untuk membantu pesantren.

Langkah apresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap pesantren di atas hanya merupakan salah satu contoh saja dari pemerintah, yaitu pada SMP. Dalam kenyataannya, seperti sudah disebutkan di atas, ada pesantren-

pesantren yang mendapatkan bantuan dari pelbagai kementerian, seperti Kementerian Agama, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, dsb.

E. Kesimpulan

Dari paparan di atas, nampak bahwa landasan etis dan praktis yang dijunjung tinggi dan dipraktikkan di pesantren memang ditujukan untuk pengembangan pribadi-pribadi yang maju, membangun, dan berkarakter. Di sini terlihat peran lembaga pendidikan pesantren terhadap penanaman jiwa kemodernan pada generasi muda, sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Pesantren mempunyai peran sentral untuk mendidik generasi muda yang datang kepadanya. Demikian karena selama di pesantren itulah, sehari-hari, para pengelola dan pendidik di pesantren telah menjadi wakil orang tua santri, wakil dari masyarakat, dan bahkan wakil dari pemerintah. Di situlah maka semua pihak (*stakeholders*) perlu terus membantu mengembangkan pesantren. Terutamanya pihak pemerintah, disarankan agar melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi program pengembangan pesantren.

Sebab di sekolah berbasis pesantren, nampak bahwa pesantren menawarkan kemodernan sebagai dasar ajaran kepada para santrinya. Dengan begitu, pesantren ikut merayakan kemajuan manusia sebagai suatu berkah bagi dunia Islam, bukan sebagai suatu kutukan yang harus ditakuti. Selebrasi kemodernan itu tentu saja dapat diwarnai oleh karakter pesantren yang memang sudah sejatinya mempunyai tradisi keislaman yang kuat. Perpaduan dua kurikulum (yang modern dan yang tradisional) yang membuat sekolah berbasis pesantren kukuh dan mantap dalam menyongsong berbagai tantangan dan cabaran dunia yang cepat berubah ini.

Akhirnya, dengan mengkaraktirikan santrinya pada kemodernan, pesantren sebetulnya sudah melakukan perluasan loyalitas pendidikan karakter dari transfer ajaran Islam (doktrinal) ke transfer kepribadian (*personal*) dan karakter (*character building*) kepada generasi muda. Pada akhirnya, pesantren pun berguna untuk individu yang ikut mesantren, yaitu santri; berguna untuk para orang tua yang menitipkan anak-anaknya; berguna untuk masyarakat; bangsa; bahkan negara. Di sini kelihatan bahwa negara pun terbantuan tugasnya dalam ”mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan dengan pendidikan kemodernannya, dapat ”mensejahterakan rakyat.”

Bibliografi

- Abdul Kadir, Emo Kastama (1990), *Inabah Suryalaya*. Tasikmalaya: Serbabakti.
- Abdullah, Taufik (1986), “The Pesantren in Historical Perspective,” in Abdullah, Taufik and Siddique, Sharon (eds.), *Islam and Society in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Misal fii Mu’amalah*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad, *Musnad Ahmad*, Jilid II, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Albrecht, Karl (1978), *Successful Management by Objectives: An Action Manual*. New Jersey: Prentice-Hall Inc. & Englewood Cliffs.
- Bertalanffy, Ludwig von (1973), *The General Systems Theory*. New York: G. Braziller.
- Boeke, J. H. (1953), *Economics and Economic Policy of Dual Societies*. Institute of Pacific Relations.
- Bruinessen, Martin van (1999), *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Mesir: Dar al-Fikr, 1994.
- Cahyono, Heru (1992), *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: dari Pemilu sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dawi, Amir Hasan (1999), *Pentorian Sosiologi dan Pendidikan*. Tanjung Malim, Perak, Malaysia: Quantum Books.

- Gatra*, 24 Januari 2007.
- Gatra*, 3 Januari 2007.
- Gatra*, 6 Desember 2006.
- Geertz, Clifford (1960), "The Javanese Kijaji: the Changing Roles of a Cultural Broker," dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol. II, No. 2, 1960.
- Hadimulyo (1985), "Dua Pesantren Dua Wajah Budaya", dalam Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M.
- Horikoshi, Hiroko (1987), *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*, Tesis Ph.D. dalam bidang Antropologi di University of Illinois, Urbana-Champaign, USA, 1976. Diterjemahkan oleh Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Huse, Edgar F. (1979), *The Modern Manager*. New York: West Publishing Company.
- Ibnu Rusyd (1995), *Bidayat al-Mujtahid*, Mesir: Dar al-Fikr.
- Indonesia*, New York: Cornell University, April 1966.
- Kemdikbud R.I. (2012), *Panduan Pelaksanaan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Pembinaan SMP Berbasis Pesantren*, Jakarta: Direktorat PSMP, Dirjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemenag R.I. (1983), *Nama dan Alamat Pondok Pesantren Se Indonesia, Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kemenag RI.
- Kemenag R.I. (1990), *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Kemenag R.I. (2000), *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Kemenag R.I. (2006), *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2005-2006*. Jakarta: Bagian Data dan Informasi Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
- Kemenag R.I. (2009), *Buku Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2008/2009*. Jakarta: Bagian Data dan Informasi Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
- Koontz, Harold; O'Donnell, Cyril; and Weihrich, Heinz (1986), *Essentials of Management*. New York: McGraw-Hill.
- Korten, David C. and Alfonso, Felipe B. (eds.) (1981), *Bureaucracy and the Poor: Closing the Gap*. Singapore: McGraw-Hill International Book Company, Copyright by Asian Institute of Management, Makatai, Metro Manila, the Philippines.
- Malik, Jamaluddin (ed.) (2005), *Pemberdayaan Pesantren: Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren dan Yayasan Kantata Bangsa.
- Mustari, Mohamad, and M. Taufik Rahman. (2010). *Peranan pesantren dalam pembangunan pendidikan masyarakat desa*. MultiPress,
- Noer, Deliar (1978), *Administration of Islam in Indonesia*. Monograph Series No. 58, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, New York: Cornell University.
- Parsons, Talcott (1963), *Structure and Process in Modern Societies*. New York, The Free Press of Glencoe, (1960), 2nd Edition.
- Praja, Juhaya S (1990), "TQN Pondok Pesantren Suryalaya dan Perkembangannya pada Masa Abah Anom (1950-1990)" dalam Harun Nasution, *Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyah: Sejarah, Asal-Usul, dan Perkembangannya*. Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubaroqiyyah.

- Prasodjo, Sudjoko (et.al.) (1982) *Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*. Jakarta: LP3ES, (1974), cetakan ketiga.
- Rahardjo, M. Dawam, (ed.) (1995), *Pesantren dan Pembaruan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Rahman, M. Taufiq. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Riggs, Fred W. (1985), *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company, (1964).
- Rostow, W. W. (1960), *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Samson, Allan (1970), "A Conception of Politics and Ideology in Contemporary Indonesian Islam" in Karl D. Jackson, *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Satu Abad Pondok Pesantren Suryalaya: Perjalanan dan Pengabdian 1905-2005* (2005). Tasikmalaya: Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Mesir: Dar al-Fikr, 1983.
- Sukamto (1999), *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Syahid, Achmad, Drs., M.A. (ed.) (2003), *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Umat: Pesantren Al-Ittifaq dalam Perbandingan*. Jakarta: Pekapontren Kemenag R.I.
- Wahid, Abdurrahman (1995), "Pesantren Sebagai Sub Kultur" dalam Rahardjo, M. Dawam, (ed.), *Pesantren dan Pembaruan*. Jakarta: LP3ES.
- Weihrich, Heinz (1985), *Management Excellence: Productivity Through MBO*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Weiner, Myron (ed.) (1966), *Modernization: The Dynamics of Growth*. New York: Basic Books Inc.
- Widodo, YB (2005), "Dinamika Pembangunan Pedesaan: Masalah Petani Gurem dan Buruh Tani di Pedesaan Jawa," dalam *Masyarakat Indonesia*, Jilid XXXI, No. 2, 2005.
- Ziemek, Manfred (1986), *Pesantren-Islamische bildung in Sozialen Wandel*, Disertasi *Doktors de Philosophie* pada Johan Wolfgang Goethe Universitat, Frankfurt, Jerman, 1983. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Butche B. Soendjojo, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.